

LINGKUP KEGIATAN DAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN LEMBAGA PENELITIAN/KONSULTAN SWASTA UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN*)

Oleh:

Amin Aziz**)

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang disadari bersama, sektor pertanian di Indonesia, sebagai konsekuensi dari sejarah dan perkembangan ekonomi, secara cepat atau lambat, pasti akan mengalami perubahan dan transformasi struktural. Perubahan struktural ini, bukan semata-mata merupakan keinginan pemerintah atau perencanaan pembangunan, melainkan karena perkembangan sejarah ekonomi itu sendiri. Ada tiga wajah perubahan struktural dalam sektor pertanian. Pertama, sumbangan pertanian secara relatif akan merosot, sementara sektor lain semakin besar peranannya dalam produksi nasional. Kedua, mereka yang bekerja di sektor pertanian, secara absolut jumlahnya bisa saja meningkat, namun persentasenya dalam jumlah lapangan kerja secara keseluruhan, akan semakin mengecil. Sebaliknya mereka yang bekerja di sektor-sektor lainnya akan meningkat. Dan ketiga, sifat produksi di semua bidang akan juga berubah, yaitu menjadi lebih bersifat industrial.

Perubahan struktural yang tidak akan terelakkan pada sektor pertanian ini pasti akan dan bahkan, telah menimbulkan persoalan tertentu. Antara lain adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di pedesaan yang akan melahirkan kelebihan tenaga kerja dan tidak tertampung oleh sektor pertanian. Kenyataan yang semacam ini, membawa persoalan yang lebih besar. Disamping semakin turunnya upah tenaga kerja sebagai akibat timpangnya pasar kerja di pedesaan, juga sektor pertanian akan terkena **law of diminishing return** (hukum pembagian hasil yang semakin kecil). Hal ini bisa mengakibatkan - dalam kalkulasi rasional - penambahan modal di sektor pertanian tidak dianggap menguntungkan. Dengan perkataan lain, **marginal rate of return** (tingkat selisih untung marginal) dari sektor pertanian, diperkirakan rendah.

Tahun 1993 Indonesia akan mengakhiri Pelita V dan memasuki strategi pembangunan jangka panjang tahap kedua. Untuk itu, pemantapan pembangunan bidang pertanian sebelum mengakhiri strategi pembangunan jangka panjang pertama, perlu dituntaskan. Dan setelah itu perlu disusun suatu kerangka landasan strategi pembangunan jangka panjang kedua khususnya di sektor pertanian. Disamping itu, berbagai informasi berkenaan hal-hal pertanian, perlu dihimpun. Demikian juga beberapa hasil pembangunan sebelumnya perlu dikaji

*) Disampaikan dalam Pertemuan Teknis III Koordinasi Penelitian Agro Ekonomi, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian RI, 31 Oktober dan 1 November 1989, Cipayung-Bogor.

**) Direktur Pelaksana Pusat Pengembangan Agribisnis dan Ketua DPP HKTI.

ulang, untuk dijadikan masukan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya, sebagai penjabaran dari prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kemajuan sebagai hasil pembangunan dapat kita catat. Demikian juga kemajuan pembangunan bidang pertanian. Namun, tidak bisa dipungkiri, kemajuan tersebut membawa implikasi lebih lanjut baik positif maupun negatif.

Dalam rangka menyongsong pertanian masa depan, yang strategi perumusan dan pencapaiannya baru akan dirumuskan pasca pembangunan jangka panjang tahap pertama, perlu dilakukan berbagai persiapan. Antisipasi, proyeksi, dan perencanaan pembangunan pertanian perlu dipersiapkan sebaik-baiknya dalam rangka usaha menciptakan kerangka landasan yang kokoh bagi pembangunan pertanian menuju lepas landas dalam Repelita VI. Untuk itu, peranan lembaga/badan penelitian dan pengembangan, serta lembaga konsultan perlu ditingkatkan.

Kegiatan pembangunan pertanian di masa datang tidak hanya menyangkut aspek produksi saja, tetapi lebih luas dari itu. Dengan demikian, tantangan pembangunan pertanian di Indonesia tidak hanya menyangkut usaha-usaha mempertahankan swasembada beras saja tetapi juga terkait dengan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan efisiensi dan pemanfaatan peluang pasar. Kehadiran lembaga penelitian/konsultan swasta dapat memberi sumbangan untuk menunjang pemecahan masalah-masalah dalam aspek-aspek pembangunan itu. Adanya konsultan ataupun lembaga penelitian ini diharapkan dapat menunjang pembangunan pertanian mulai dari tahap perencanaan, evaluasi, dan monitoring serta rekomendasi. Sebagai suatu contoh misalnya, penelitian di bidang sumber daya alam yang ditujukan untuk efisiensi dan pelestarian sumber daya alam. Dalam hal ini, Pemerintah selama Pelita IV telah melakukan survei tanah tinjau seluas 16,4 juta hektar yang tersebar di seluruh propinsi. Hasil survei tanah tinjau dapat digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan pertanian pada tingkat regional.

PERAN LEMBAGA PENELITIAN KONSULTAN SWASTA

Tantangan sektor pertanian Pelita V saat ini adalah karena diletakkannya prioritas pembangunan pada bidang ekonomi dengan titik tekan pada sektor industri, khususnya agroindustri. Dengan demikian, suatu hal yang harus diwujudkan adalah kemampuan menyediakan bahan baku dengan mutu yang baik secara terus menerus bagi industri pengolahan dan kepastian terhadap kelayakan pasar.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas, paling tidak dibutuhkan empat hal. Pertama, perlu disusun peta komoditi pertanian yang didasarkan pada pengembangan komoditi atas dasar kemampuan wilayah. Kedua, perlu disediakan teknologi produksi yang padat karya. Ketiga, perlu ditingkatkan kemampuan petani dalam menjalankan usahatani. Dan keempat, tersedianya informasi pasar secara memadai.

Keempat hal tersebut ternyata belum sepenuhnya siap mendukung keberhasilan produksi pertanian di Indonesia. Terutama teknologi pertanian dan

kemampuan petani. Teknologi produksi yang ada sebagian besar diperuntukan bagi skala usaha menengah atas. Sementara usahatani menengah bawah kurang mendapat perhatian. Di pihak lain, kemampuan petani mengolah usahatannya dalam mengikuti permintaan pasar masih relatif rendah.

Sedangkan dua hal lainnya sedikit banyak sudah dapat dilakukan oleh lembaga penelitian atau konsultan swasta, walaupun pemanfaatan hasil penelitiannya belum dilakukan secara optimal. Untuk itu, perlu dijalin kerjasama antara lembaga penelitian dengan lembaga/instansi pengguna hasil penelitian.

Sebelum proyek-proyek pertanian dibangun, terlebih dulu dilakukan studi pendahuluan. Lembaga penelitian/konsultan swasta dapat berperan dalam melakukan studi pendahuluan. Disamping itu, ia dapat juga terlibat dalam penelitian-penelitian untuk mengkaji sejauh mana kemanfaatan proyek-proyek tersebut bagi peningkatan kesejahteraan petani, termasuk juga mengkaji dampak negatif proyek tersebut. Bahkan konsultan dapat terus terlibat dalam keseluruhan tahap-tahap pembangunan proyek, mulai dari studi pendahuluan, mendisain proyek, pembangunan proyek, dan evaluasi dampak proyek.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh lembaga konsultan dalam merancang sebuah proyek. Pertama, secara teknis proyek tersebut memang mampu dibangun. Kedua, secara ekonomis proyek tersebut memang menguntungkan; dan ketiga, secara sosial budaya proyek yang akan dibangun tersebut dapat diterima oleh masyarakat di sekitar dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Setiap pembangunan proyek-proyek pertanian, selain harus memenuhi ketiga persyaratan di atas, ia harus pula mampu menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja setempat dimana proyek tersebut dibangun. Dengan kata lain, proyek padat karya. Selain itu, proyek tersebut harus berorientasi ekspor dan memanfaatkan sebanyak mungkin sumberdaya dalam negeri, baik itu bahan baku maupun tenaga kerja pelaksanaannya. Inilah beberapa prinsip yang harus dipegang dalam rangka pembangunan proyek.

Bila sekarang ini peran konsultan lebih bersifat pasif (artinya, hanya menunggu rencana proyek yang akan dibangun pemerintah), maka dengan semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan, peran tersebut untuk saat-saat mendatang sudah tidak relevan lagi. Untuk itu, peran tersebut harus diubah, dari pasif menjadi aktif. Artinya, dari pihak swasta secara aktif diharapkan adanya usulan/tawaran program-program yang diajukan kepada pemilik dana dalam hal ini pemerintah. Pihak swasta/konsultan secara aktif "menghunting" informasi. Ia harus pula secara tajam mampu menangkap aspirasi pemerintah. Untuk itu, ia harus berpegang kepada prinsip-prinsip pembangunan proyek sebagaimana kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Sampai sekarang ini studi kelayakan pembangunan proyek-proyek yang dibiayai oleh bantuan luar negeri dilakukan oleh negara-negara atau lembaga pemberi bantuan. Dari tiga tahap pembangunan proyek - perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi - Indonesia ternyata lemah dalam perencanaan dan evaluasi, dan hanya kuat berperan dalam pelaksanaan (Kompas, 31 Juli 1989). Karena kelemahan inilah perencanaan proyek masih dilakukan oleh negara atau lembaga pemberi bantuan. Inilah salah satu penyebab tidak efisiennya pemanfaatan

bantuan luar negeri, bahkan cenderung ke arah pemborosan. Hal ini dilakukan oleh negara atau lembaga pemberi bantuan, dengan suatu motivasi menjual uang sebanyak-banyaknya yang sangat cenderung mempertinggi biaya proyek. Ini terjadi karena studi kelayakan dilakukan oleh mereka.

Melihat kenyataan seperti di atas, maka pemerintah hendaknya secara aktif, kreatif, dan seksama dalam melakukan perencanaan proyek-proyek pertanian. Ada dua langkah yang harus ditempuh. Pertama, karena Indonesia lemah dari segi perencanaan, maka harus segera diperkuat tenaga-tenaga perencana. Khususnya dalam tubuh Bappenas dan Bappeda, yang sementara ini terkesan hanya melaksanakan fungsi membagi-bagi dan mengadministrasi proyek dan tidak melakukan tugas-tugas di bidang perencanaan. Untuk itu Bappenas harus lebih cepat lagi melakukan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang secara khusus diarahkan pada bidang kegiatan-kegiatan perencanaan. Sementara tenaga ahli perencana tersebut belum tersedia, Indonesia bisa membayar tenaga asing. Yang penting Indonesia sebagai pemegang proyek. Langkah kedua, pemerintah perlu meningkatkan peran konsultan swasta Indonesia asli dan menjadikannya sebagai mitra kerja. Untuk meningkatkan peran mereka, maka tidak ada salahnya bila pemerintah juga memberi kesempatan kepada konsultan swasta untuk melakukan perencanaan proyek-proyek pertanian. Bahkan kalau perlu konsultan swasta diberi kesempatan untuk langsung melobi kepada negara atau lembaga calon pemberi bantuan. Dengan cara ini ada dua keuntungan. Pertama, pemerintah turut serta membesarkan konsultan swasta nasional. Dan kedua, akan mengefisienkan pemanfaatan bantuan luar negeri. Ini bisa terjadi karena adanya persaingan secara sehat diantara lembaga konsultan swasta nasional.

Peningkatan peran konsultan swasta juga perlu dilakukan dengan secara bertahap meningkatkan peran, tanggung jawab, dan posisi konsultan Indonesia dalam kerjasamanya dengan konsultan asing. Pola kerjasama ini perlu segera dialihkan secara bertahap dari posisi subkontrak, anggota konsorsium, mitra konsorsium (**co-project direction**), dan sampai ke **leading firm**. Pengalihan peran dan posisi ini perlu diprogramkan oleh Bappenas dan instansi-instansi Pemerintah.

Adapun secara rinci peran yang dapat dimainkan oleh lembaga penelitian konsultan swasta diantaranya:

1. Melakukan perencanaan proyek-proyek pertanian dan melakukan studi kelayakan atas proyek-proyek pertanian yang akan dibangun
2. Melakukan penelitian dampak sosial ekonomi atas dibangunnya suatu proyek dan pergeseran-pergeseran yang terjadi di sektor pertanian serta implikasinya pada sektor-sektor lainnya, termasuk dampak sosial ekonomi atas penerapan teknologi di sektor pertanian
3. Mengkaji kemampuan dan daya dukung pertanian
4. Melakukan riset pasar, dalam dan luar negeri
5. Melakukan prediksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian
6. Riset kebijaksanaan dan konsultasi

7. Melakukan proyeksi kebutuhan tanah bagi kebutuhan pembangunan disegala bidang
8. Memberikan pelayanan jasa informasi, baik pada aspek produksi, aspek pasar, dan institusi pelaksanaanya.

LINGKUP KEGIATAN DAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN LEMBAGA PENELITIAN KONSULTAN SWASTA

Lingkup Kegiatan dan Penelitian

Lingkup kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penelitian konsultan swasta adalah sebagai berikut:

1. Studi Kebijakan dan Konsultansi

Lembaga penelitian konsultan swasta dapat melakukan studi dan riset kebijaksanaan terhadap berbagai segi-segi pembangunan yang berkaitan dengan dampaknya terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, ekonomi, pertanian, industri, lingkungan, serta akibat-akibat sosial budaya. Disamping melakukan analisis terhadap kebijaksanaan yang telah ada, riset ini bertujuan pula untuk memberikan masukan bagi kebijaksanaan baru. Riset ini tidak hanya mengkaji dampak lokal terhadap komunitas sekitarnya, tetapi menelusuri juga dampaknya secara nasional.

Pengembangan wilayah pertanian, transmigrasi, permukiman baru, sumberdaya alam dan manusia, dan pengembangan masyarakat pedesaan merupakan beberapa bidang studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian/konsultan swasta.

Studi kebijaksanaan dan konsultasi ini dapat dilakukan baik pada tahap pra-investasi, pra-**feasibility**, maupun pada tahap **feasibility study**. Hal ini perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum suatu proyek dibangun. Ini penting sebagai suatu wujud evaluasi pra-proses untuk mengkaji sejauh mana proyek tersebut layak (secara teknis, ekonomis, dan sosial budaya) untuk dibangun.

2. Riset Pasar

Studi-studi dari riset pasar yang dilakukan lembaga penelitian/konsultan swasta mencakup estimasi pasar potensial bagi produk/jasa yang baru maupun yang telah ada, penyusunan profil pembeli/pelanggan dan pengembangan strategi pemasaran.

3. Perencanaan Strategik dan Evaluasi

Lembaga penelitian/konsultan swasta menyediakan pelayanan dalam perencanaan strategik dan evaluasi bagi organisasi litbang, pemerintah, bisnis maupun kemasyarakatan. Studi ini mencakup kebijaksanaan diversifikasi, evaluasi program, proyek, pendapatan serta pengorganisasian fungsi pemasaran. Pelayanan dapat diberikan bagi pengambilan keputusan vital seperti penyisihan proyek, program atau produk yang tidak bermanfaat, identifikasi dan penyaringan

gagasan baru, penilaian atas perubahan ekonomi, teknologi dan kemasyarakatan yang mempunyai dampak terhadap organisasi. Disamping itu, evaluasi potensi, peluang dan kelemahan organisasi, perancangan dan pengembangan usaha, program dan proyek baru juga dipelajari.

4. Kajian Dampak

Lembaga penelitian konsultan swasta telah mengembangkan teknik-teknik dalam mengkaji dampak lingkungan aspek ekonomi, sosial, fisik dari pertumbuhan komunitas yang cepat. Konsultan menyediakan pendekatan-pendekatan dalam memaksimalkan masalah dan meminimalkan masalah yang diakibatkan pertumbuhan tadi. Setiap studi disesuaikan dengan kebutuhan klien serta mempertimbangkan berbagai tanggung jawab antara pemerintah dan sektor industri/pertanian.

5. Program Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat

Bagaimanapun juga usaha untuk membantu masyarakat luas khususnya masyarakat pedesaan yang sebagian besar masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah, adalah tidak semata-mata tanggung jawab salah satu instansi saja, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah maupun masyarakat umum lainnya. Di sinilah pihak swasta diharapkan dapat memainkan peranannya.

Peningkatan pendapatan merupakan tuntutan masyarakat. Suatu kerja nyata yang membawa hasil dalam waktu singkat, dapat dilihat dan dirasakan hasilnya sangat diinginkan mereka. Untuk itu, lembaga swasta khususnya LSM/LPSM banyak melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan masyarakat. Sebagai contoh misalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu membantu mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan di Indonesia melalui peningkatan taraf hidup sosial ekonomi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan pada usaha pengembangan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan keswadayaan mereka. Untuk mencapai tujuan itu diantaranya dengan cara mendorong kelompok sasaran membentuk kelompok-kelompok usaha bersama atau kelompok swadaya yang bekerja secara **self management** dan **self organization** serta berupaya untuk meningkatkan pendapatan masing-masing anggota. LSM akan membantu secara langsung perkembangan kelompok dengan jalan menyertakan seorang petugas lapangan yang mendampingi perkembangan kelompok serta memberikan masukan-masukan sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangannya.

Kegiatan Penelitian yang Dilakukan Konsultan Swasta

Beberapa lembaga penelitian/konsultan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan pertanian dan pedesaan diantaranya adalah:

1. Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA)

Yayasan Agribisnis yang mengelola **Pusat Pengembangan Agribisnis** didirikan pada bulan Juli 1978 di Jakarta. Selama tahun 1988 Pusat Pengembangan Agribisnis menangani 27 buah proyek, dimana 16 buah (59 persen) di antaranya dibiayai oleh lembaga keuangan internasional dan 4 buah (15 persen) merupakan studi dan pilot proyek yang dibiayai oleh Pusat Pengembangan Agribisnis. Dibandingkan dengan tahun 1987 terjadi peningkatan pelaksanaan proyek sebanyak 7 buah. Sama halnya pada tahun 1986 dan 1987, penurunan pengerjaan proyek pada tahun ini disebabkan masih adanya pengurangan Anggaran Pemerintah disamping belum tergalinya beberapa potensi di berbagai instansi baik Pemerintah maupun swasta.

Adapun penyebaran proyek yang dikerjakan Pusat Pengembangan Agribisnis menurut bidang penelitian selama tahun 1988 dibandingkan tahun 1986 dan 1987 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penyebaran proyek yang ditangani Pusat Pengembangan Agribisnis berdasarkan bidang penelitian tahun 1986-1988

No.	Bidang penelitian	Jumlah			Persentase		
		1986	1987	1988	1986	1987	1988
1.	Tanaman Pangan	6	8	6	7	20	11
2.	Hortikultura	5	0	3	6	0	6
3.	Perkebunan	9	5	6	10	12	11
4.	Peternakan	9	6	6	10	15	11
5.	Perikanan	2	0	2	2	0	4
6.	Kehutanan	1	0	0	1	0	0
7.	Transmigrasi	5	4	4	6	10	8
8.	Tenaga kerja	3	0	0	3	0	0
9.	Koperasi	6	5	3	7	12	6
10.	Sosial ekonomi/pemasaran	15	4	9	17	10	17
11.	Industri kecil	6	2	1	7	5	2
12.	Industri	3	0	2	3	0	4
13.	Teknologi pasca panen	9	1	0	10	2	0
14.	Pengairan	2	2	3	2	5	6
15.	Pengembangan wilayah	6	4	8	7	10	15
16.	Analisa dampak lingkungan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		87	41	53	100	100	100

Berdasarkan bidang penelitiannya, proyek yang ditangani pada tahun 1988 adalah proyek-proyek di bidang sosial ekonomi/pemasaran yaitu sebesar 17 persen, menyusul proyek-proyek di bidang-bidang pengembangan wilayah (15 persen), tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan masing-masing sebesar 11 persen, transmigrasi (8 persen), serta hortikultura, koperasi dan pengairan masing-masing sebesar 6 persen.

Beberapa proyek yang dapat ditangani pada tahun lalu, tidak ditangani kembali pada tahun 1988 adalah untuk bidang teknologi pasca panen. Hal ini

perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam terutama dalam pengembangan program di bidang pemasaran.

Disamping itu, ditemui perkembangan yang cukup menggembirakan yakni adanya bidang yang ditangani pada tahun 1986 dan tidak ditangani pada tahun 1987, tetapi selanjutnya ditangani kembali pada tahun 1988. Bidang-bidang tersebut adalah hortikultura, perikanan, dan industri.

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, proyek yang ditangani oleh Pusat Pengembangan Agribisnis pada tahun 1988 mencakup 56 jenis.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan yang sering dilakukan adalah survei (32 persen) diikuti oleh pemantauan (14 persen), supervisi dan evaluasi (13 persen), serta perencanaan/disain (11 persen). Sedangkan pada tahun sebelumnya kegiatan yang sering dilakukan meliputi perencanaan/disain, survei, studi kelayakan dan evaluasi.

Tabel 2. Penyebaran jenis penelitian proyek-proyek Pusat Pengembangan Agribisnis tahun 1986-1988

No.	Jenis	Jumlah			Persentase		
		1986	1987	1988	1986	1987	1988
1.	Studi kebijaksanaan	15	2	2	15	5	4
2.	Studi kelayakan	4	6	3	4	14	5
3.	Profil proyek	6	0	2	6	0	4
4.	Perencanaan/disain	20	5	6	22	11	11
5.	Supervisi	9	6	7	10	14	13
6.	Evaluasi	13	3	7	14	7	13
7.	Survei	1	16	18	20	36	32
8.	Pemantauan	7	5	8	8	11	14
9.	Appraisal	0	1	1	0	2	2
10.	Pilot project	0	0	2	0	0	4
Total		93	44	56	100	100	100

Selama tahun 1988 lembaga/instansi yang menjadi klien pusat pengembangan agribisnis meningkat setelah jauh menurun dari tahun 1986 sampai tahun 1987 seiring dengan menciutnya anggaran pemerintah di bidang penelitian dan jasa konsultasi. Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Bank Indonesia, Departemen Transmigrasi merupakan klien yang sering menggunakan jasa pusat pengembangan agribisnis, dan Direktorat Jenderal Peternakan, maka untuk tahun 1988, instansi yang sering menggunakan jasa pusat pengembangan agribisnis adalah Direktorat Jenderal Peternakan (19 persen), Departemen Transmigrasi (15 persen) dan swasta (11 persen).

Tabel 3 menunjukkan adanya instansi yang tidak menggunakan jasa pusat pengembangan agribisnis pada tahun 1987 tetapi memanfaatkannya pada tahun 1988 yaitu Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Perkebunan, Biro Perencanaan Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, BKPM Kalimantan Tengah, dan Bappeda D.I. Aceh.

Tabel 3. Penyebaran klien dalam proyek-proyek Pusat Pengembangan Agribisnis tahun 1986-1988

No.	Klien	Jumlah			Persentase		
		1986	1987	1988	1986	1987	1988
1.	Bank Indonesia	4	3	0	14	16	0
2.	Bapindo	1	0	0	3	0	0
3.	Ekuin	3	1	1	10	5	4
4.	Bappenas	1	0	1	3	0	4
5.	Departemen Transmigrasi	5	3	4	17	16	15
6.	Departemen Pekerjaan Umum	2	0	2	7	0	7
7.	Departemen Koperasi	2	0	0	7	0	0
8.	Ditjen Tanaman Pangan	1	0	0	3	0	0
9.	Ditjen Peternakan	3	3	5	10	16	19
10.	Ditjen Perkebunan	0	0	1	0	0	4
11.	BPLPP Deptan	1	1	1	3	5	4
12.	Biro Perencanaan Deptan.	0	0	1	0	0	4
13.	Puslitbang Depnaker	1	0	0	3	0	0
14.	Departemen Perdagangan	0	0	1	0	0	4
15.	BKPM Kalimantan Tengah	2	0	1	7	0	4
16.	Bulog	0	1	0	0	5	0
17.	Bappeda D.I. Aceh	0	0	1	0	0	4
18.	Swasta dan PTP	3	3	3	10	16	11
19.	Lain-lain	0	4	5	0	21	19
Total		29	19	27	100	100	100

Sebagaimana tahun sebelumnya, apabila dilihat dari segi sumber dana, tampak sebagian besar (60 persen) jumlah proyek yang ditangani oleh pusat pengembangan agribisnis tahun 1988 dibiayai oleh dana bantuan luar negeri, disusul oleh dana dari pusat pengembangan agribisnis (15 persen), serta APBN dan swasta masing-masing 11 persen. Sumber dana luar negeri yang ikut membiayai proyek-proyek tersebut adalah IBRD/Bank Dunia, IFAD, MEE, USAID/CID, CIDA, dan ADB. Sedangkan yang dibiayai pusat pengembangan agribisnis terutama untuk pelaksanaan **pilot project**.

Dari pelaksanaan proyek pusat pengembangan agribisnis tahun 1988 sebagaimana telah diuraikan dimuka, terlihat bahwa dampak dari adanya pencutian anggaran pemerintah serta lesunya dunia usaha selama tahun 1986-1987 adalah berkurangnya jumlah proyek yang ditangani, baik dari segi jumlah, bidang penelitian, jenis penelitian, maupun dari jumlah lembaga/instansi yang menjadi klien pusat pengembangan agribisnis. Tetapi mulai tahun 1988 terlihat adanya peningkatan-peningkatan yang cukup menggembirakan.

Tabel 4. Penyebaran proyek-proyek Pusat Pengembangan Agribisnis menurut sumber dana tahun 1986-1988

No.	Jenis	Jumlah			Persentase		
		1986	1987	1988	1986	1987	1988
1.	A P B N	10	2	3	34	10	11
2.	A P B D	2	0	1	7	0	4
3.	IBRD/Bank Dunia	5	4	5	17	20	19
4.	I F A D	1	3	5	3	15	19
5.	M E E	4	3	1	14	15	4
6.	USAID/CID	1	1	2	3	5	7
7.	A D B	4	4	2	14	20	7
8.	C I D A	0	0	1	0	0	4
9.	Swasta	2	3	3	7	15	11
10.	P P A	0	0	4	0	0	15
Total		29	20	27	100	100	100

2. Pan Asia Research & Communication Service

Pan Asia Research & Communication Service didirikan pada bulan Nopember 1976 di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang-bidang, seperti, riset kebijakan (policy research), ekonomi/industri, agribisnis, riset pasar, manajemen, perencanaan strategik dan evaluasi, kajian dampak, latihan dan konsultasi manajemen, hubungan masyarakat dan seminar.

Bahwa persoalan pembangunan dan masalah-masalah kemanusiaan yang terlibat didalamnya, kian lama kian menghendaki perhatian yang sungguh-sungguh dan keprihatinan yang mendalam dari semua kalangan. Keberhasilan pembangunan secara kuantitatif selama ini, pada akhirnya menuntut adanya pertimbangan pembangunan yang setara secara kualitatif.

Aspek kualitatif dari pembangunan adalah bahwa proses pembangunan tersebut mampu melibatkan peran serta, rasa pemilikan dan sikap kepedulian masyarakat terhadapnya. Pembangunan pada akhirnya dituntut untuk mampu menyadarkan masyarakat pada permasalahan yang mereka hadapi, menggerakkan masyarakat agar mampu merumuskan kebutuhan mereka sendiri, dan mendorong mereka untuk mengupayakan pemecahannya secara bersama-sama. Maka pembangunan yang bersikap kualitatif merupakan suatu upaya pelibatan masyarakat luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan juga dalam penilaian hasil pembangunan tersebut. Dalam pengertian ini, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian, pembangunan pada dasarnya adalah tanggung jawab setiap warga negara maupun komunitas yang hidup dimana pembangunan itu dilaksanakan. Sebagai suatu komunitas dan lembaga profesional yang hadir di tengah masyarakat Indonesia, maka pan asia research & communication service menganggap pembangunan nasional yang sedang berlangsung saat ini adalah juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Dengan potensi dan sumberdaya keahlian yang dimilikinya, pan asia research & communication service merasa ter-

panggil untuk terlibat secara aktif dan positif dalam proses pembangunan nasional tersebut.

Untuk itulah, pan asia research & communication service mengundang berbagai pihak yang memiliki potensi, sumberdaya, kesempatan dan keprihatinan yang sama terhadap masalah-masalah pembangunan dan kemanusiaan di Indonesia, untuk bekerjasama dalam berbagai kegiatan berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

Sejak berdirinya sampai dengan sekarang, pan asia research & communication service telah selesai menangani berbagai proyek penelitian dan konsultasi baik itu proyek pemerintah atau swasta, yang dananya berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Proyek-proyek penelitian dan konsultasi yang pernah ditangani oleh pan asia research & communication service, diantaranya dalam bidang-bidang: profil komoditi, marketing, investasi, ekspor, komunikasi, financing, lingkungan, konsep-konsep organisasi, peraturan pemerintah, recruiting, latihan dan pendidikan. Secara rinci diuraikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penelitian yang pernah dilakukan Pan Asia Research & Communication Service.

	Profil komoditi	Pema- saran	Investasi/ kelayakan	Finan- cing	Ekspor	Komu- nikasi	Organisasi/ kelem- bagaan	Ling- kungan
Sembilan bahan pokok dan terigu	3	—	—	—	—	1	—	—
Peternakan/perikanan/ perkebunan/hortikultura	—	2	3	—	3	—	—	—
Industri	7	3	2	2	5	1	2	1
Pasar modal	—	—	1	2	—	—	1	—
Penanaman modal	—	—	1	—	—	—	—	—
Media massa/humas	—	—	—	—	—	6	—	—
Koperasi/KUD	—	—	—	2	—	—	7	—
Kesejahteraan rakyat	—	—	—	—	—	1	—	2
U m u m	—	3	—	1	—	4	—	—

3. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)

LP3ES didirikan pada bulan Agustus 1971 di Jakarta. Lembaga ini melakukan studi/kajian sosial ekonomi pembangunan di Indonesia serta melakukan penerbitan. Selain itu juga menangani pelatihan bagi tenaga motivator pembangunan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat miskin dan terbelakang. LP3ES juga merupakan lembaga penelitian dengan titik tekan pada studi kebijakan dan mengembangkan metode penelitian **participatory action and researches**. Di bidang penerbitan, LP3ES banyak menerbitkan buku-buku teks untuk universitas dan karangan ilmiah termasuk menerbitkan majalah ilmiah, **PRISMA**. Sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat, LP3ES juga menangani masyarakat terbelakang di pedalaman dan masyarakat perkotaan.

Beberapa hasil kegiatan yang dilakukan LP3ES diantaranya berupa laporan-laporan kegiatan penelitian di berbagai daerah di bidang-bidang seperti: industri kecil, pengembangan masyarakat pesantren, pembangunan regional, masyarakat kota, permukiman, irigasi, perkumpulan pengguna air dan transmigrasi.

Di bidang penerbitan, LP3ES menerbitkan majalah ilmiah, **PRISMA**, baik dalam edisi bahasa Indonesia maupun dalam edisi bahasa Inggris dan **BIES (Bulletin of Indonesia Economic Studies)**. LP3ES juga menerbitkan bulletin bagi pengembangan masyarakat pesantren, **PESAN**, serta beberapa buku teks untuk universitas seperti ekonomi, statistik, politik, sosiologi, antropologi dan sejarah serta literatur ilmiah lainnya.

Dalam kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan masyarakat, LP3ES telah melakukan kegiatannya di berbagai daerah; seperti industri kecil (di Aceh, Jakarta, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat), irigasi (di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi), koperasi (di Jakarta dan Jawa Tengah), pesantren (di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura), teknologi terapan di Jawa Tengah, peranan wanita di Jawa Tengah, produksi makanan di Kalimantan dan penyediaan air di Nusa Tenggara Barat.

LP3ES telah banyak menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti: ACFOD, ADAB, ADB, CIDA, DHV, FAO, FORD FOUNDATION, FNS, IBRD, ILO, OXFAM, PADCO, UNICEF, UNU, USAID, SDC dan TOOL. Sedangkan dengan lembaga di dalam negeri LP3ES menjalin kerjasama dengan beberapa departemen, seperti: Departemen Koperasi, Perindustrian, Penerangan, Agama, Perdagangan, Pekerjaan Umum; Kantor Menteri Muda Peningkatan Produksi Dalam Negeri (kala itu), Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Kantor Sekretariat Negara.

4. Bina Swadaya

Bina swadaya didirikan pada tahun 1967 (saat itu dengan nama Yayasan Sosial Tani Membangun). Tujuan bina swadaya adalah membantu mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan di Indonesia melalui peningkatan taraf hidup sosial ekonomi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan dorongan, bimbingan, dan bantuan pada usaha pengembangan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan keswadayaan mereka.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas digariskan beberapa strategi antara lain:

1. Mendorong kelompok sasaran membentuk kelompok-kelompok usaha bersama atau kelompok swadaya yang bekerja secara **self management** dan **self organization** serta berupaya untuk meningkatkan pendapatan masing-masing anggota. Dalam penyelenggaraan kelompok diusahakan agar terselenggara proses saling belajar mengajar serta mengutamakan kemampuan sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.
2. Membantu secara langsung perkembangan kelompok dengan jalan menyertakan seorang petugas lapangan yang mendampingi perkembangan kelompok.

pok serta memberikan masukan-masukan sesuai dengan kebutuhan tingkat-tingkat perkembangannya. Masukan-masukan tersebut antara lain berupa:

- a. pengembangan sumberdaya manusia
- b. pengembangan modal swadaya
- c. pengembangan usaha produktif
- d. pengembangan kelembagaan kelompok
- e. pengembangan hubungan kerjasama

Bantuan-bantuan secara langsung ini bersifat sangat intensif.

3. Untuk memperluas jangkauan dan dampak kegiatan bina swadaya diselenggarakan kerjasama dengan berbagai organisasi maupun lembaga, baik pemerintah maupun bukan pemerintah, mengembangkan kelompok-kelompok swadaya atau kelompok usaha bersama melalui organisasi atau lembaga mereka. Dengan strategi terakhir ini dampak dan cakupan kegiatan bina swadaya dilipatgandakan.
4. Ikut membentuk dan membina jaringan kerja (network) antara LPSM dan dengan pemerintah baik di dalam maupun luar negeri serta menyelenggarakan berbagai kombinasi program secara kreatif untuk memungkinkan pendayagunaan secara optimal sumberdaya dari berbagai organisasi maupun lembaga yang ada.
5. Berpartisipasi dalam berbagai upaya perumusan kebijaksanaan pembangunan serta berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut melalui berbagai seminar, lokakarya, dan forum-forum dialog, untuk menunjang peningkatan swadaya masyarakat.

Selanjutnya strategi-strategi di atas dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkrit. Begitulah menurut teori. Dalam praktek penyelenggaraan bina swadaya, yang terjadi adalah sebaliknya. Mula-mula dalam wadah bina swadaya sejumlah fungsionaris mencoba berbagai kegiatan secara kecil-kecilan, katakanlah melakukan inovasi. Kalau kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan hasil, kemudian disistematiskan dan dijamin yang satu dengan yang lain menjadi suatu rangkaian terpadu dan dari situ dirumuskan (direfleksikan) strategi.

Lokasi kegiatan bina swadaya meliputi berbagai propinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Secara lebih rinci kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kelompok Swadaya

Kegiatan pengembangan kelompok swadaya dilakukan dengan menampilkan kehadiran seorang petugas lapangan atau disebut pembina kelompok swadaya. Bimbingan terhadap kelompok oleh para pembina dilakukan dengan pedoman-pedoman berikut:

- a. Peningkatan pendapatan.
- b. Kelompok dimotivasi untuk mempunyai wawasan keterbukaan yaitu terbuka terhadap gagasan baru
- c. Organisasi kelompok bersifat demokratis dan partisipatif

2. Pendidikan dan Latihan

Banyak kegiatan pendidikan dan latihan dilakukan oleh bina swadaya dengan berbagai lingkup kegiatan, bidang maupun tingkatan peserta pendidikan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dilakukan baik secara tersebar di lokasi-lokasi kelompok swadaya maupun di pusat-pusat pendidikan dan latihan di wilayah dan yang diselenggarakan dalam Pusat Pendidikan dan Latihan bina swadaya sendiri yang berada di Cimanggis, Bogor. Beberapa jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh bina swadaya antara lain:

- a. Pendidikan dan latihan untuk anggota kelompok
 - b. Pendidikan pengurus
 - c. Pendidikan dan latihan untuk penggerak atau promotor kelompok usaha bersama
 - d. Pendidikan dan latihan untuk pembina
 - e. Pelatihan manajemen pengembangan swadaya masyarakat
3. Pemupukan Modal Swadaya
 4. Pelayanan Usaha (produksi dan pemasaran)
 5. Penerbitan, yaitu dengan menerbitkan buku-buku praktis di bidang pertanian termasuk majalah pertanian, **TRUBUS**.

5. Pusat Data Business Indonesia (PDBI)

PDBI didirikan pada bulan Februari 1980 di Jakarta. **PDBI** mengusahakan tercapainya cita-cita untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri khususnya di bidang informasi. Ambisi tersebut didukung oleh sarana pokok, yaitu koleksi arsip Salinan Akta Perseroan Terbatas sejak tahun 1950 sampai dengan tahun yang sedang berjalan. Melalui data yang dimiliki, **PDBI** melakukan penelitian apa dan siapa di belakang suatu perusahaan. Selama dekade pertama sejak berdirinya, **PDBI** mencanangkan Dwi Program Strategis guna mengidentifikasi Profil dan Anatomi Sistem Ekonomi Indonesia beserta kompleksitas strukturnya.

Beberapa studi, analisis, dan penelitian yang pernah dilakukan **PDBI** diantaranya:

1. Top Corp File Report Series

Ini merupakan laporan penelitian pertama dan satu-satunya yang menganalisa struktur piramida ekonomi Indonesia yang mengungkapkan antara lain:

- a. Siapa yang menguasai mengendalikan ekonomi Indonesia?
- b. Pangsa pasar BUMN, PMA/MNC dan PMDN untuk 44 produk dan jasa.
- c. Kompetisi segitiga AS, Jepang, dan MEE dalam 17 sektor bisnis.
- d. Tabulasi komputer ranking BUMN berdasarkan:
 - Total aktiva (dipimpin oleh Bank Indonesia)
 - Total penjualan (nomor satu : Pertamina)
 - **Return on Investment**. Siapa BUMN paling efisien?
- e. Analisis empiris terhadap BUMN manca negara dan tendensi swastaisasi ekonomi dunia.

- f. Analisis historis BUMN di Indonesia dan alternatif swastanisasi.
 - g. Rekomendasi pembentukan INDONESIA Inc. melalui restrukturisasi, integrasi, dan konsolidasi BUMN ke dalam konglomerasi.
 - h. Peta dan anatomi konglomerasi swasta Indonesia.
 - i. Analisis historis dan kontemporer kelompok bisnis Indonesia.
 - j. Tabulasi komputer konglomerasi swasta dan daftar urutan 50 besar konglomerat raksasa Indonesia serta 250 urutan lainnya.
 - k. Peta dan anatomi MNC di Indonesia.
 - l. Analisis menyeluruh perusahaan asing di Indonesia.
2. Seri Profil Industri di Indonesia
- Seri profil industri Indonesia adalah program kedua yang meliputi informasi dan analisis sektor-sektor industri dalam sistem bisnis Indonesia. Setiap Seri Profil Industri memuat bahan-bahan sebagai berikut:
- a. Pandangan umum terhadap sektor industri yang bersangkutan.
 - b. Uraian analitis terhadap problematika yang dihadapi industri yang sedang dibahas.
 - c. Analisis kuantitatif total penjualan dan estimasi pangsa pasar masing-masing sektor industri.
 - d. Rekomendasi kebijaksanaan masa depan.
 - e. Data lengkap masing-masing perusahaan mencakup modal yang ditanam, kepemilikan, dan struktur manajemen.
- Seri Profil Industri Indonesia meneliti 15 sektor yang tergambar sebagai B1 - B15.
3. Menyelenggarakan seminar-seminar dengan topik bahasan pada **trend** bisnis yang tengah menjadi pembicaraan. PDBI dalam hal ini menyajikan makalah yang didukung dengan data yang valid sebagai hasil analisis terakhirnya. Sebagai contoh, Seminar **Strategi Ekspor dan Peluang Bisnis Agroindustri** (6 Juli 1989). PDBI dalam Seminar ini menyajikan resume dari dua studi mutakhirnya, yaitu Estate Indonesia dan Forestry Indonesia, yang isinya mengungkapkan secara rinci komposisi komoditas andalan ekspor Indonesia dari sektor agribisnis yang pada tahun 1987 mencapai lebih dari separuh ekspor non-migas Indonesia.

HAMBATAN DAN FAKTOR PENDORONG

Penelitian-penelitian pertanian dan pedesaan terutama dalam aspek sosial ekonomi dan teknologi yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan petani sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga konsultan swasta. Masalahnya, hasil-hasil penelitian tersebut belum termanfaatkan dengan optimal. Penyebabnya antara lain adalah; pertama, hasil penelitian tersebut belum banyak dikembangkan ke arah yang lebih operasional. Faktor pembatasnya antara lain tiadanya dana untuk memproduksi dan mengembangkan hasil penelitian tersebut. Kedua, hasil-hasil penelitian dan teknologi yang dikem-

bangkan belum mampu dijangkau oleh sebagian besar pejabat di luar instansi pemesan apalagi oleh petani. Ketiga, kurangnya koordinasi dan keterpaduan antara instansi/lembaga yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian pembangunan pertanian dan pedesaan. Dalam hal yang terakhir ini, termasuk di dalamnya tidak adanya koordinasi dan kerjasama di antara badan litbang (penelitian dan pengembangan) swasta dengan badan litbang Pemerintah. Untuk itu, kiranya perlu dicari mekanisme kelembagaan yang bagaimana yang secara efektif dapat meningkatkan kerjasama badan litbang antara yang dikelola swasta dengan yang dikelola pemerintah.

Kebijaksanaan pemerintah dalam menerapkan deregulasi dan debirokratisasi serta digiatkannya ekspor non-migas, telah menggiatkan sektor swasta untuk berperan serta secara lebih luas dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Implikasi kebijaksanaan ini adalah meningkatnya permintaan akan jasa konsultasi di bidang pertanian, jasa penelitian, dan jasa informasi agribisnis dalam rangka menggiatkan pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Peran konsultan swasta perlu diperkuat terutama dalam kaitan kerjasama dan persaingannya dengan konsultan asing. Secara sadar hendaknya Bappenas dengan instansi-instansi Pemerintah resmi mengembangkan peranan konsultan swasta Indonesia secara memihak.

PENUTUP

Demikian makalah ini disusun sebagai partisipasi kami dalam mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi diantara lembaga-lembaga penelitian/konsultan swasta yang bergerak di bidang pertanian dan pembangunan pedesaan. Semoga melalui pertemuan ini juga dirumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih operasional bagi pengembangan lembaga/badan yang menangani penelitian dan pengembangan baik yang ditangani oleh pihak swasta maupun yang ditangani oleh pihak pemerintah. Melalui forum inilah diharapkan hasil-hasil penelitian dapat disebarluaskan dan dikembangkan/diaplikasikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan khususnya yang tinggal di pedesaan.

Pembahasan Atas Makalah

LINGKUP KEGIATAN DAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN LEMBAGA PENELITIAN/KONSULTAN SWASTA UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN

Oleh:

Iksan Semaoen*)

PENDAHULUAN

Panitia pengarah memberikan porsi topik diskusi dalam session ini persis seperti yang tertera dalam judul makalah di atas. Makalah yang diminta oleh Panitia Pengarah menyoroti peran lembaga swasta yang semakin meningkat dalam melayani kebutuhan penelitian sosial ekonomi pertanian, proyeksi kebutuhan jasa penelitian, peran yang dapat dimainkan oleh lembaga penelitian/konsultan swasta (LPKS), serta hambatan dan faktor pendorong agar dapat menyumbangkan peranannya secara optimal.

Setelah membaca makalah pemrasaran, diperoleh kesan bahwa pemrasaran telah berusaha dengan baik memenuhi permintaan Panitia Pengarah. Peran LPKS dirumuskan berdasarkan pengalaman dari beberapa kelembagaan swasta, termasuk pengalaman pemrasaran sendiri sebagai Direktur Pusat Pengembangan Agribisnis. Walaupun miskin pengalaman mengenai apa yang telah dan sedang dilakukan oleh LPKS, akan dicoba diri untuk membahas makalah yang diberikan oleh pemrasaran yang secara langsung menjadi direktur salah satu LPKS.

Penggolongan Penelitian

Untuk melihat lingkup penelitian yang dikerjakan oleh LPKS itu, barangkali berguna melihat klasifikasi penelitian yang diberikan oleh Prof. Dr. Dody Tisna Amidjaja. Dalam konperensi nasional ilmu pengetahuan, ketika beliau menjabat sebagai Ketua LIPI, memberikan makalah dengan judul "Pola Umum Kebijakan Penelitian di Indonesia", beliau membagi penelitian kedalam empat golongan, yaitu:

1. Penelitian dasar: Penelitian untuk penemuan fenomena baru.
2. Penelitian terapan¹⁾, dibagi menjadi tiga tahapan:
 - a. Eksplorasi penelitian terarah, untuk melihat kemungkinan aplikasi dari fenomena baru, tes percobaan khasiat, dan cara isolasi.

*) Kepala Pusat Penelitian Universitas Brawijaya dan Dosen Fak. Pertanian Unibraw, Malang.

¹⁾ Penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah, atau untuk menentukan bidang penelitian lebih baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Sedangkan penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan tujuan praktis tertentu.

- b. Penelitian yang terarah pada suatu misi, berupa pengembangan metoda untuk isolasi dan persiapan produk, pengembangan metoda screening, pengembangan ide untuk penggunaan, dan perumusan kemungkinan keuntungan secara komersil.
 - c. Pengembangan produk dan proses.
3. Desain komersil dan instalasi.

Ada dua jembatan antara domain riset dan domain komersil yang sangat kritis, yaitu pembuatan operasi pilot plan dan tes pasaran, dan revidi menyeluruh sebagai persiapan untuk komersialisasi. Yang pertama, seringkali cukup sulit dan kritis karena ini menyangkut pengalihan hasil penelitian dari skala laboratorium ke skala prototip. Yang terakhir inilah yang mungkin dimaksudkan sebagai studi kelayakan sebelum sesuatu perusahaan memulai usahanya secara komersial. Tugas PAE, sebagaimana tercantum dalam buku panduan, disamping (a) melaksanakan penelitian sendiri dengan spesifikasi penelitian sosial ekonomi pertanian, juga berkeinginan (b) mengkoordinasi penelitian sosial ekonomi pertanian. Lingkup penelitian PAE, adalah jelas, bukan untuk menghasilkan teknologi, tetapi bertugas mengkaji aplikasi penerapan teknologi: kemungkinan-kemungkinan aplikasi teknologi yang sudah ada, dampak dari penggunaan teknologi, alokasi dan kombinasi sumberdaya supaya proses produksi lebih efisien dalam menggunakan sumberdaya, pengembangan wilayah baru, memprediksikan dampak dari kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bila dikaitkan dengan klasifikasi penelitian dari Prof. Dody, tidak berarti PAE tidak melakukan penelitian dasar dalam arti untuk menemukan fenomena baru. Karena sifatnya ilmu sosial dan ekonomi, sebagian cabang dari kedua golongan ilmu ini adalah ilmu terapan, maka fenomena baru yang diperoleh dari hasil penelitian sosial ekonomi seringkali langsung dapat digunakan untuk keperluan praktis bagi kepentingan pembangunan.

Fokus Diskusi

Kegiatan pembangunan pertanian dalam Repelita V bukan saja untuk meningkatkan produksi tetapi diarahkan pada usaha peningkatan nilai tambah yang diarahkan pengembangan industri pertanian. Mellor (1976) mengatakan bahwa penelitian yang ditujukan untuk pembangunan pertanian memainkan peranan dalam tiga hal, yaitu (1) membantu desain dari program dan proyek pembangunan yang lebih baik, (2) analisa permasalahan dalam proyek-proyek yang dilaksanakan, dan (3) memberikan masukan (feedback) bagi program dan implementasi proyek lebih lanjut. Pemrasaran dalam makalah membedakan 3 tahapan pembangunan proyek: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Justru dalam perencanaan dan evaluasi merupakan porsi dari penelitian, perencanaan menggunakan informasi dan pengetahuan yang sudah ada, dan juga disain, analisa problematik, dan umpan balik.

Bila yang diminta PAE dalam Pertemuan Teknis ini adalah lingkup kegiatan dan penelitian yang dilakukan LPKS, maka diduga ada dua interpretasi.

Pertama, barangkali kita perlu membahas porsi diskusi yang seharusnya tercakup dalam session ini. Kata kunci adalah LPKS, penelitian, dan pertanian/pedesaan.

Interpretasi yang pertama, yaitu penelitian apa yang telah dan sedang dilakukan oleh LPKS itu. Hal ini telah diungkapkan dengan baik dalam makalah pemrasaran, berdasarkan pengalaman yang telah dan sedang dilakukan.

Sebagai contoh, pemrasaran mengungkapkan pengalaman penelitian yang dilakukan beberapa LPKS. Ternyata kegiatannya beraneka ragam. LP3ES, sesuai pemberian nama kelembagaan itu, kegiatannya beraneka ragam, mulai dari penelitian sosial ekonomi yang dipesan oleh berbagai pengguna: pihak swasta, pemerintahan, badan-badan internasional, pelatihan, dan lain-lainnya, penerbitan (majalah ilmiah, buku-buku teks universitas). Tetapi, LP3ES yang saya ketahui juga melaksanakan penelitian yang mereka tentukan sendiri karena mempunyai dana penelitian, yang diperoleh dari sponsor untuk keperluan itu.

Interpretasi yang kedua, dari makalah yang diminta oleh PAE, karena yang diminta "lingkup kegiatan dan penelitian", maka yang dimaksudkan adalah penelitian apa yang seharusnya dilakukan oleh LPKS, atau macam penelitian manakah yang seharusnya tidak dilakukan oleh LPKS.

Klasifikasi Kelembagaan Penelitian dan Lingkup Kegiatan

Menurut ciri tugas dan fungsi utama, serta lingkup tanggung jawabnya, di Indonesia dibedakan empat kelompok lembaga-lembaga peneliti, yakni:

- a. Perguruan tinggi, dilingkungan Depdikbud.
- b. Lembaga-lembaga penelitian non-departemental, seperti LIPI, dan badan-badan penelitian khusus, a.l. Batan, Lapan, Bakosurtanal, dan BPPT.
- c. Balitbang di lingkungan departemen dalam struktur pemerintahan, seperti Balitbangtan, dimana PAE merupakan bagian dari litbang ini.
- d. Lembaga-lembaga penelitian swasta, seperti yang telah disebutkan oleh pemrasaran, a.l. Pusat Pengembangan Agribisnis, LP3ES.

PAE termasuk dalam golongan kelembagaan yang ketiga, dan yang menjadi porsi dalam makalah ini adalah domain penelitian berada pada golongan kelembagaan yang keempat.

Menurut pemrasaran, lingkup kegiatan dan penelitian yang dapat dilakukan LPKS adalah:

- a. Studi kebijakan dan konsultasi
- b. Riset pasar
- c. Perencanaan strategik dan evaluasi
- d. Kajian dampak
- e. Program pengembangan dan pengabdian pada masyarakat

Komposisi kegiatan dan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Agribisnis, selama 3 tahun terakhir adalah cukup besar:

- a. Sosial ekonomi/pemasaran, 17%
- b. Penelitian komoditi, 11%
- c. Transmigrasi, 8%
- d. Hortikultura, koperasi, pengairan, 36%

Sebagai salah satu bandingan terhadap apa yang telah dilakukan oleh LPKS di Indonesia, saya ingin kemukakan pengalaman dari salah satu LPKS luar negeri yang banyak berperan di Indonesia, yaitu HASKONING, yang didirikan pada tahun 1881, dan menjadi suatu perusahaan pada tahun 1981. Pengalamannya dalam penelitian dan disain proyek, tersebar diseluruh dunia, yang meliputi golongan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan manajemen regional dan perkotaan
- b. Pembangunan infrastruktur
- c. Perlindungan dan manajemen lingkungan
- d. Pembangunan pedesaan terpadu
- e. Pengembangan pelabuhan dan pantai
- f. Pembangunan sungai dan delta sungai
- g. Pembangunan pertanian

Selama 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 1989, HASKONING telah menyelesaikan tugas-tugas studi yang berkaitan dengan pembangunan di Indonesia sebanyak 43 buah. Klien yang memberikan kontrak bukan hanya badan-badan internasional seperti Pemerintah Belanda, UNDP, World Bank, tetapi juga dari Pemerintah Indonesia, a.l., PLN, Cipta Karya, Dep. Perhubungan, Dep. Pertanian, Depdikbud, dan beberapa perusahaan swasta di Indonesia. Bidang kegiatan yang dilakukan adalah studi kelayakan, misalnya untuk pembangunan pelabuhan; pembangunan pertanian, perikanan, pabrik, pembangunan kota, air minum, sampai dengan pengembangan universitas, dilakukan oleh LPKS ini.

Barangkali dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh LPKS tidak ada yang termasuk golongan penelitian dasar.

Proyeksi Kebutuhan Penelitian

Dalam makalah, pemrasaran telah berusaha merumuskan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Yang diungkapkan oleh pemrasaran adalah perkembangan jumlah proyek penelitian yang dikerjakan. Jumlah kegiatan proyek berfluktuasi, karena (1) menciutnya anggaran pemerintah, dan (2) lesunya dunia usaha. Alasan yang diberikan pemrasaran adalah benar, yang diinginkan oleh LPKS jumlah kontrak penelitian yang besar. Ini sebagai refleksi dari badan swasta, sehingga kontrak penelitian yang lebih banyak pada tahun 1988 dikatakan cukup menggembirakan. Pesanan yang diperoleh berfluktuasi karena pekerjaan penelitian merupakan *derived demand* dari kegiatan pembangunan, yang merupakan fungsi dari tersedianya anggaran dan kegiatan industri. Tetapi, barangkali yang dimaksudkan dengan kendala-kendala yang dimin-ta oleh panitia pengarah bukan hanya kendala keterbatasan dana finansil sehingga jumlah penelitian lebih sedikit.

Barangkali yang perlu diungkapkan dan diminta oleh panitia pengarah, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh LPKS dalam melaksanakan penelitian dalam rangka usaha meningkatkan peran serta LPKS dalam memberikan kontribusi pada pembangunan di Indonesia. Misalnya:

- a. Permasalahan "recruiting tenaga peneliti", terutama yang berkaitan dengan kualitas. Barangkali benar bahwa tidak ada lembaga penelitian swasta di dunia ini yang mempunyai tenaga ahli "stand by", yang akan membebani "fixed-cost" terlalu besar. LPKS hanya memiliki tenaga-tenaga peneliti inti, disiplin dan jumlah tambahan tenaga peneliti biasanya direkrut sesuai dengan kebutuhan. Beberapa kali saya menerima edaran tawaran kesediaan menyerahkan C.V., yang barangkali akan digunakan oleh LPKS untuk menyiapkan personalia dari proyek baru yang akan dikerjakan. Hasil penelitian merupakan komoditas ekonomi yang harus dibayar oleh konsumen, yaitu pemesan, dan diproduksi oleh kelembagaan penelitian. Kualitas barang menentukan harga, dan yang selanjutnya ditentukan oleh kualitas produsen, yaitu tenaga peneliti yang terlibat. Yang perlu dikemukakan adalah kendala-kendala untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan kualitas hasil penelitian yang lebih bermutu.
- b. Tersedianya prasarana yang dimiliki. Bagaimanapun Balitbangtan berbahagia dengan adanya kelembagaan penelitian swasta yang dalam beberapa tahun terakhir ini mulai tampil di Indonesia. Walaupun LPKS luar negeri ternyata masih dianggap lebih bonafid bukan karena lebih murah tetapi seringkali karena mempunyai kekuatan monopoli. Badan internasional, sponsor proyek pembangunan tentu akan memilih konsultan yang dianggap "bonafid". Oleh karena itu, barangkali yang perlu diungkapkan adalah prasarana penelitian apa yang dianggap masih menjadi kendala untuk melaksanakan penelitian. Bila prasarana itu menjadi kendala, bagaimana cara mengatasinya, misalnya laboratorium penelitian yang belum dimiliki oleh LPKS dalam negeri.
- c. Hubungan antara LPKS dan pemberi dana. Kita juga ingin bertukar pikiran dengan LPKS mengenai pengalaman hubungan antara kelembagaan penelitian dan pemberi dana. Menurut pengalaman universitas, tidak semua pemesan menghendaki kualitas barang baik, karena hasil yang dicapai bukan untuk konsumsi pribadi. Beberapa pemesan ada yang hanya ingin belanja tanpa memperhatikan hasil pekerjaan, barang jelekpun diterima, asal harganya lebih murah tetapi bayarannya lebih mahal. Ini merupakan salah satu kendala mengapa seringkali hasil penelitian tidak diterapkan oleh pemesan. Saya juga memperoleh kesan yang sama dengan pemrasaran, bahwa Bappenas tampaknya perlu lebih serius dalam mengarahkan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Lingkup Penelitian : Seharusnya

Penelitian apa yang seharusnya dikerjakan dalam rangka menunjang pembangunan pertanian dan sektor pedesaan? Dan kemudian yang manakah yang menjadi porsi yang seharusnya ditangani oleh LPKS? Barangkali bukan pada tempatnya untuk mengutarakan dalam makalah bahasan ini, karena ini menyangkut bidang dan spektrum penelitian yang luas sekali.

Dari beberapa contoh di atas, lingkup penelitian yang dilakukan oleh LPKS ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Mencakup penelitian yang hasilnya segera tampak (quick yielding), yaitu penelitian yang bersifat terapan, dan berguna langsung bagi pemesan.
- b. LPKS seyogyanya tidak perlu melakukan penelitian dasar, karena penelitian ini membutuhkan (a) investasi yang sangat besar, dan (b) hasil penelitian yang bermanfaat seringkali hanya diperoleh dalam jangka panjang.

BAHAN BACAAN

- Amidjaja, D.A. Tisna. 1986. Pola Umum Kebijaksanaan Penelitian di Indonesia, KIPNAS IV, 8-12 Sept. 1986.
- Anonimous. 1989. Prequalification document, Agricultural Research Management: Technical assistance and training consultancy. Haskoning-Landbouwniversitet Wageningen.
- Mellor, J.W. 1976. Strategy for Policy on Economic Development, Office of Policy Development and Analysis, Bureau for Program and Policy Coordination.